

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-35 /PB/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-33/PB/2014 TENTANG PEDOMAN
PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN LAINNYA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum bidang layanan lainnya telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2015;
- b. bahwa untuk mengakomodasi perbaikan pedoman penilaian kinerja aspek pelayanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan penambahan pedoman penilaian kinerja aspek keuangan dan aspek pelayanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, perlu dilakukan perubahan dalam tata cara penilaian kinerja Badan Layanan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-33/PB/2014 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN LAINNYA.

M

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penilaian kinerja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mulai digunakan untuk penilaian kinerja BLU Tahun Anggaran 2015.

2. Ketentuan pada Lampiran I.2 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
3. Ketentuan, pada Lampiran II.10 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Ketentuan pada Lampiran II ditambahkan Lampiran II.22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto Harjowiryo
MARWANTO HARJOWIRYONO *M2*

**TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA ASPEK KEUANGAN
 BLU BIDANG LAYANAN LAINNYA
 PENGELOLA KAWASAN**

A. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN

Penilaian kinerja keuangan terhadap BLU bidang layanan lainnya Pengelola Kawasan meliputi:

1. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran);
2. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK);
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam); dan
4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Perhitungan kinerja aspek keuangan BLU bidang layanan lainnya Pengelola Kawasan mempunyai skor paling tinggi 30, yang terdiri dari:

1. Subaspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19,5 dan
2. Subaspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 10,5.

Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Subaspek dan Indikator	Skor
1.	Rasio Keuangan	19,5
	a. Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>).	0,9
	b. Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>).	0,9
	c. Periode Penagihan Piutang (<i>Collection Period</i>).	1,2
	d. Perputaran Aset Tetap (<i>Fixed Asset Turnover</i>).	3
	e. Imbalan atas Aset Tetap (<i>Return on Fixed Asset</i>).	3
	f. Imbalan Ekuitas (<i>Return on Equity</i>).	3
	g. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional.	7,5
2.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	10,5
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif.	1,5
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.	3,3
	c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU.	2,1
	d. Tarif Layanan.	0,9
	e. Sistem Akuntansi.	0,9
	f. Persetujuan Rekening.	0,3
	g. SOP Pengelolaan Kas.	0,3
	h. SOP Pengelolaan Piutang.	0,3
	i. SOP Pengelolaan Utang.	0,3
	j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.	0,3
	k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.	0,3
Jumlah Skor Aspek Keuangan (1+2)		30

M

B. PENILAIAN INDIKATOR PADA ASPEK KEUANGAN

1. Rasio Keuangan

a. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rumus:

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Kas adalah uang tunai atau saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU.
- 2) Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Skor rasio kas adalah sebagai berikut:

Rasio Kas (%) (RK)	Skor
RK > 1.080	0,18
960 < RK ≤ 1.080	0,36
840 < RK ≤ 960	0,54
720 < RK ≤ 840	0,72
600 < RK ≤ 720	0,9
480 < RK ≤ 600	0,72
360 < RK ≤ 480	0,54
240 < RK ≤ 360	0,36
120 < RK ≤ 240	0,18
0 < RK ≤ 120	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" (Pengelola Kawasan) mempunyai rasio kas sebesar 380%, maka skor untuk rasio kas BLU "A" adalah 0,54.

b. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rumus:

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:
 - a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca;
 - b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 - c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- 2) Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.

- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Skor rasio lancar adalah sebagai berikut:

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
RL > 600	0,9
480 < RL ≤ 600	0,72
360 < RL ≤ 480	0,54
240 < RL ≤ 360	0,36
120 < RL ≤ 240	0,18
0 < RL ≤ 120	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" (Pengelola Kawasan) mempunyai rasio lancar sebesar 482%, maka skor untuk rasio lancar BLU "A" adalah 0,72.

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

Rumus:

$$\frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

Penjelasan:

- 1) Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU.
- 2) Pendapatan usaha merupakan PNBPN BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Skor periode penagihan piutang adalah sebagai berikut:

Periode Penagihan Piutang (hari) (PPP)	Skor
PPP < 10	1,2
10 ≤ PPP < 20	0,96
20 ≤ PPP < 30	0,72
30 ≤ PPP < 40	0,48
40 ≤ PPP < 50	0,24
PPP ≥ 50	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" (Pengelola Kawasan) mempunyai periode penagihan piutang 25 hari, maka skor untuk rasio periode penagihan piutang BLU "A" adalah 0,72.

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan operasional merupakan PNBPN BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN dan hibah.
- 2) Aset tetap dihitung berdasarkan nilai buku aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

Skor rasio perputaran aset tetap adalah sebagai berikut:

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
PAT > 1	3
0,8 < PAT ≤ 1	2,4
0,6 < PAT ≤ 0,8	1,8
0,4 < PAT ≤ 0,6	1,2
0,2 < PAT ≤ 0,4	0,6
0 < PAT ≤ 0,2	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" (Pengelola Kawasan) mempunyai rasio perputaran aset tetap 0,9%, maka skor untuk rasio perputaran aset tetap BLU "A" adalah 2,4.

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan.
- 2) Aset tetap adalah nilai buku aset tetap tanpa memperhitungkan konstruksi dalam pengerjaan.

Skor rasio imbalan atas aset tetap adalah sebagai berikut:

Return on Fixed Asset (%) (ROFA)	Skor
ROFA > 9	3
8 < ROFA ≤ 9	2,7
7 < ROFA ≤ 8	2,4
6 < ROFA ≤ 7	2,1
5 < ROFA ≤ 6	1,8
4 < ROFA ≤ 5	1,5
3 < ROFA ≤ 4	1,2
2 < ROFA ≤ 3	0,9
1 < ROFA ≤ 2	0,6
0 < ROFA ≤ 1	0,3
ROFA ≤ 0	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" (Pengelola Kawasan) mempunyai rasio imbalan atas aset tetap 9%, maka skor untuk rasio imbalan atas aset tetap BLU "A" adalah 2,7.

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Ekuitas - Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan.

- 2) Ekuitas adalah selisih antara hak residual BLU atas aset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki.

Skor rasio imbalan ekuitas adalah sebagai berikut:

<i>Return on Equity (%)</i> (ROE)	Skor
ROE > 9	3
8 < ROE ≤ 9	2,7
7 < ROE ≤ 8	2,4
6 < ROE ≤ 7	2,1
5 < ROE ≤ 6	1,8
4 < ROE ≤ 5	1,5
3 < ROE ≤ 4	1,2
2 < ROE ≤ 3	0,9
1 < ROE ≤ 2	0,6
0 < ROE ≤ 1	0,3
ROE ≤ 0	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" (Pengelola Kawasan) mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 7%, maka skor untuk rasio imbalan ekuitas BLU "A" adalah 2,1.

g. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan PNBPN merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.
- 2) Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBPN BLU.

Skor rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional adalah sebagai berikut:

Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional (%) (PB)	Skor
PB > 75	7,5
67,5 < PB ≤ 75	6,75
60 < PB ≤ 67,5	6
52,5 < PB ≤ 60	5,25
45 < PB ≤ 52,5	4,5
37,5 < PB ≤ 45	3,75
30 < PB ≤ 37,5	3
22,5 < PB ≤ 30	2,25
15 < PB ≤ 22,5	1,5
7,5 < PB ≤ 15	0,75
0 ≤ PB ≤ 7,5	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" (Pengelola Kawasan) mempunyai rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional sebesar 62%, maka skor untuk rasio kas BLU "A" adalah 6.

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

1) Jadwal Penyusunan

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, setelah terbit Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, RBA dilakukan penyesuaian menjadi RBA Definitif yang ditandatangani menteri/pimpinan lembaga. RBA Definitif harus sudah ditandatangani menteri/pimpinan lembaga paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Adapun penilaian ditentukan dari jangka waktu ditandatanganinya RBA Definitif sebagaimana skor tabel berikut:

Jangka Waktu RBA Definitif Ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga	Skor
1. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0,3
2. Setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0

2) Kelengkapan

Sesuai ketentuan PMK Nomor 92/PMK.05/2011, RBA Definitif disusun dengan ketentuan:

- Ditandatangani oleh pemimpin BLU;
- Diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga jika BLU tidak mempunyai dewan pengawas;
- Disetujui dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga; dan
- Format sesuai dengan PMK No. 92/PMK.05/2011.

Skor untuk kelengkapan RBA adalah sebagai berikut:

Kelengkapan	Skor	
	Ya	Tidak
1. Ditandatangani oleh pemimpin BLU	0,3	0
2. Diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga jika BLU tidak mempunyai dewan pengawas	0,3	0
3. Disetujui dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga	0,3	0
4. Kesesuaian format dengan PMK No. 92/PMK.05/2011	0,3	0

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.05/2008, BLU diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan diaudit oleh auditor eksternal, serta menyampaikannya ke Direktorat Pembinaan PK BLU dengan jadwal sebagai berikut:

- Triwulan I : paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
- Semester I : paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir;
- Triwulan III : paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
- Tahunan : paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir;
- Audit Laporan Keuangan oleh auditor eksternal paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran berikutnya;
- Opini audit Laporan Keuangan.

Skor untuk waktu penyampaian dan audit Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Laporan	Waktu Penyampaian	Skor
1.	Laporan Keuangan Triwulan I	1. disampaikan sampai dengan tanggal 15	0,15
		2. terlambat s.d. 30 hari	0,075
		3. terlambat lebih dari 30 hari	0
2.	Laporan Keuangan Semester I	1. disampaikan sampai dengan tanggal 10	0,3
		2. terlambat s.d. 30 hari	0,075
		3. terlambat lebih dari 30 hari	0
3.	Laporan Keuangan Triwulan III	1. disampaikan sampai dengan tanggal 15	0,15
		2. terlambat s.d. 30 hari	0,075
		3. terlambat lebih dari 30 hari	0
4.	Laporan Keuangan Tahunan	1. disampaikan sampai dengan tanggal 20	0,3
		2. terlambat s.d. 30 hari	0,075
		3. terlambat lebih dari 30 hari	0
5.	Audit Laporan Keuangan Tahunan	1. diaudit oleh auditor eksternal s.d tanggal 31 Mei TA berikutnya	0,9
		2. diaudit oleh auditor eksternal setelah tanggal 31 Mei TA berikutnya	0,45
		3. Tidak diaudit	0

Skor untuk audit Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Hasil Audit Laporan Keuangan	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (<i>unqualified</i>)	1,5
Wajar Dengan Pengecualian (<i>qualified</i>)	1,2
Tidak Berpendapat (<i>disclaimer</i>)	0,9
Tidak Wajar (<i>adverse</i>)	0,6
Belum/Tidak diaudit (<i>unaudited</i>)	0

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

Sesuai ketentuan PER-30/PB/2011, BLU mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) ke KPPN minimal satu kali dalam satu triwulan, yaitu paling lambat disampaikan pada akhir triwulan berkenaan.

SP3B BLU disamping memuat pendapatan dan belanja, juga memuat jumlah saldo awal kas yang telah sesuai dengan saldo akhir kas triwulan sebelumnya.

Skor untuk waktu penyampaian dan kebenaran saldo kas adalah sebagai berikut:

Jenis SPM	Waktu Penyampaian dan Kebenaran Saldo Kas	Skor
SP3B BLU Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan I	0,351
	2. Disampaikan setelah triwulan I	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,177
SP3B BLU Triwulan II	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan II	0,351
	2. Disampaikan setelah triwulan II	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,177
SP3B BLU Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan III	0,351
	2. Disampaikan setelah triwulan III	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,177
SP3B BLU Triwulan IV	1. Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran	0,351
	2. Masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan pengesahan	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,177

d. Tarif Layanan

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, BLU harus memiliki tarif layanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau didelegasikan kepada menteri/pimpinan lembaga/pemimpin BLU sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan BLU berkenaan.

Skor untuk tarif layanan adalah sebagai berikut:

Tahap Pengusulan	Skor
1. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.	0,9
2. Apabila tarif masih dalam proses penilaian di Kementerian Keuangan.	0,6
3. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif berdasarkan PP.	0,45
4. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.	0,3
5. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan pemimpin BLU.	0

e. Sistem Akuntansi

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.05/2008, BLU diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi, yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Biaya, dan Sistem Akuntansi Aset Tetap.

Skor untuk sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

Sistem Akuntansi	Skor	
	Ya	Tidak
Sistem Akuntansi Keuangan	0,3	0
Sistem Akuntansi Biaya	0,3	0
Sistem Akuntansi Aset Tetap	0,3	0

f. Persetujuan Rekening

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 05/PMK.05/2010, BLU dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara.

Rekening lainnya dimaksud terdiri dari Rekening Pengelolaan Kas BLU, Rekening Operasional BLU dan Rekening Dana Kelolaan.

Skor untuk persetujuan rekening adalah sebagai berikut:

Persetujuan Rekening dari Kuasa BUN Pusat	Skor	
	Ya	Tidak
Rekening Pengelolaan Kas	0,09	0
Rekening Operasional	0,12	0
Rekening Dana Kelolaan	0,09	0

g. SOP Pengelolaan Kas

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 16, BLU melaksanakan pengelolaan kas berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Kas.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Kas adalah sebagai berikut:

SOP Pengelolaan Kas (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Kas	0,3	0

h. SOP Pengelolaan Piutang

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 17, BLU melaksanakan pengelolaan piutang berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Piutang.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Piutang adalah sebagai berikut:

SOP Pengelolaan Piutang (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Piutang	0,3	0

mu

i. SOP Pengelolaan Utang

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 18, BLU melaksanakan pengelolaan utang berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Utang.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Utang adalah sebagai berikut:

SOP Pengelolaan Utang (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Utang	0,3	0

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 20, BLU melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

Skor untuk penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

SOP Pengadaan Barang dan Jasa (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,3	0

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 21, BLU melaksanakan pengelolaan barang inventaris berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang inventaris oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Barang Inventaris adalah sebagai berikut:

SOP Pengelolaan Barang Inventaris (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,3	0



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Marwanto Harjowiryo
MARWANTO HARJOWIRYONO

**TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA ASPEK PELAYANAN
 BLU BIDANG LAYANAN LAINNYA
 PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
 PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)**

A. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN

Perhitungan kinerja Aspek Pelayanan BLU bidang layanan lainnya pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mempunyai skor paling tinggi 70, yang terdiri atas:

1. Subaspek Pertumbuhan Produktivitas Layanan dengan skor paling tinggi 40;
2. Subaspek Efisiensi Layanan dengan skor paling tinggi 20; dan
3. Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi 10.

Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Skor
1.	Pertumbuhan Produktivitas Layanan	40
	a. Layanan pengelolaan lahan.	4
	b. Layanan perencanaan teknik	2
	c. Layanan lalu lintas barang.	4
	d. Layanan pembangunan prasarana dan sarana	4
	e. Layanan pemanfaatan aset	6
	f. Layanan pengelolaan air dan limbah	4
	g. Layanan pelabuhan laut.	6,4
	h. Layanan bandar udara.	4
	i. Layanan rumah sakit .	4
	j. Layanan teknologi informasi.	1,6
2.	Efisiensi Layanan	20
	a. Layanan pengelolaan lahan.	2
	b. Layanan perencanaan teknik	1
	c. Layanan lalu lintas barang.	2
	d. Layanan pembangunan prasarana dan sarana.	2
	e. Layanan pemanfaatan aset.	3
	f. Layanan pengelolaan air dan limbah.	2
	g. Layanan pelabuhan laut.	3,2
	h. Layanan bandar udara.	2
	i. Layanan rumah sakit .	2
	j. Layanan teknologi informasi.	0,8
3.	Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat	10
	Indeks Kepuasan Masyarakat.	10
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2+3)		70

B. PENILAIAN INDIKATOR PADA ASPEK PELAYANAN

1. Pertumbuhan Produktivitas Layanan

a. Layanan pengelolaan lahan.

1) Pelayanan izin alokasi lahan.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan izin prinsip alokasi lahan.

R0 = realisasi izin prinsip tahun sebelumnya.

R1 = realisasi izin prinsip tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian persetujuan izin pematangan lahan adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Izin Prinsip Alokasi Lahan (%) (IPAL)	Skor
IPAL \geq 20	1,6
10 \leq IPAL $<$ 20	1,28
0 \leq IPAL $<$ 10	1
-10 \leq IPAL $<$ 0	0,8
-40 \leq IPAL $<$ -10	0,52
IPAL $<$ -40	0,264

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data izin prinsip alokasi lahan tahun (20xx-1) sebanyak 500 surat izin dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 540 surat izin. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 8,00% sehingga diperoleh skor sebesar 1.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

atau, dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan izin prinsip alokasi lahan.

R0 = realisasi luas alokasi lahan tahun sebelumnya (m²).

R1 = realisasi luas alokasi lahan tahun yang dihitung (m²).

2) Pelayanan rekomendasi hak atas tanah.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan rekomendasi hak atas tanah.

R0 = realisasi rekomendasi hak atas tanah tahun sebelumnya.

R1 = realisasi rekomendasi hak atas tanah tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan rekomendasi hak atas tanah adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Rekomendasi Hak Atas Tanah (%) (RHAT)	Skor
RHAT \geq 20	0,8
10 \leq RHAT $<$ 20	0,64
0 \leq RHAT $<$ 10	0,5
-10 \leq RHAT $<$ 0	0,36
-40 \leq RHAT $<$ -10	0,26
RHAT $<$ -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data rekomendasi hak atas tanah tahun (20xx-1) sebanyak 120 surat dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 123 surat. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 2,50% sehingga diperoleh skor sebesar 0,5.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

atau, dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan hak atas tanah bersertifikat.

R0 = realisasi hak atas tanah bersertifikat tahun sebelumnya (m²).

R1 = realisasi hak atas tanah bersertifikat tahun yang dihitung (m²).

3) Pelayanan izin peralihan hak.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan izin peralihan hak.

R0 = realisasi pelayanan izin peralihan hak tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan izin peralihan hak tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pelayanan izin peralihan hak adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Izin Peralihan Hak (%) (PIPH)	Skor
PIPH \geq 20	0,8
10 \leq PIPH $<$ 20	0,64
0 \leq PIPH $<$ 10	0,5
-10 \leq PIPH $<$ 0	0,36
-40 \leq PIPH $<$ -10	0,26
PIPH $<$ -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan izin peralihan hak tahun (20xx-1) sebanyak 20 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 18 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar (- 10 %) sehingga diperoleh skor sebesar 0,36.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan).

4) Pelayanan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

R0 = realisasi pelayanan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pelayanan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (%) (PUWTO)	Skor
PUWTO \geq 20	0,8
10 \leq PUWTO $<$ 20	0,64
0 \leq PUWTO $<$ 10	0,5
-10 \leq PUWTO $<$ 0	0,36
-40 \leq PUWTO $<$ -10	0,26
PUWTO $<$ -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan Perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita tahun (20xx-1) sebanyak 20 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 18 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar (- 10 %) sehingga diperoleh skor sebesar 0,36.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

b. Layanan perencanaan teknik.

Layanan persetujuan izin fatwa planologi.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan persetujuan izin fatwa planologi.

R0 = realisasi izin fatwa planologi tahun sebelumnya.

R1 = realisasi izin fatwa planologi tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan persetujuan izin fatwa planologi adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Persetujuan Izin Fatwa Planologi (%) (PIFP)	Skor
PIFP \geq 20	2
10 \leq PIFP $<$ 20	1,5
0 \leq PIFP $<$ 10	1
-10 \leq PIFP $<$ 0	0,5
-40 \leq PIFP $<$ -10	0,26
PIFP $<$ -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan persetujuan izin fatwa planologi tahun (20xx-1) sebanyak 80 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 88 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 10 % sehingga diperoleh skor sebesar 1,5.
(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

c. Layanan lalu lintas barang.

1) Pelayanan izin usaha (registrasi usaha).

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan izin usaha (registrasi usaha).

R0 = realisasi izin usaha (registrasi usaha) yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi izin usaha (registrasi usaha) yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian persetujuan izin usaha (registrasi usaha) adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Izin Usaha (%) (IU)	Skor
$IU \geq 20$	0,68
$10 \leq IU < 20$	0,568
$0 \leq IU < 10$	0,456
$-10 \leq IU < 0$	0,344
$-40 \leq IU < -10$	0,232
$IU < -40$	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan persetujuan izin usaha (registrasi usaha) tahun (20xx-1) sebanyak 66 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 80 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 21,21 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,68.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

2) Pelayanan Importir Terdaftar (IT).

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan penetapan importir terdaftar.

R0 = realisasi izin penetapan importir terdaftar yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi izin penetapan importir terdaftar yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian persetujuan penetapan importir terdaftar adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Penetapan Importir Terdaftar (%) (PIT)	Skor
PIT \geq 20	0,64
10 \leq PIT < 20	0,528
0 \leq PIT < 10	0,416
-10 \leq PIT < 0	0,304
-40 \leq PIT < -10	0,192
PIT < -40	0,08

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan persetujuan penetapan importir terdaftar tahun (20xx-1) sebanyak 78 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 80 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 2,56 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,416.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

3) Pelayanan penetapan Importir Terdaftar Produk Tertentu (ITPT).

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan Penetapan Importir Terdaftar Produk Tertentu (ITPT).

R0 = realisasi Importir Terdaftar Produk Tertentu (ITPT) yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi Importir Terdaftar Produk Tertentu (ITPT) yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian persetujuan Importir Terdaftar Produk Tertentu (ITPT) adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Importir Terdaftar Produk Tertentu (%) (ITPT)	Skor
ITPT \geq 20	0,68
10 \leq ITPT < 20	0,568
0 \leq ITPT < 10	0,456
-10 \leq ITPT < 0	0,344
-40 \leq ITPT < -10	0,232
ITPT < -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan penetapan importir terdaftar produk tertentu tahun (20xx-1) sebanyak 66 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 75 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 13,64 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,568.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

4) Pelayanan Izin Pemasukan Barang (IPB).

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan Izin Pemasukan Barang (IPB).

R0 = realisasi Izin Pemasukan Barang (IPB) yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi Izin Pemasukan Barang (IPB) yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian persetujuan Izin Pemasukan Barang (IPB) adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Izin Pemasukan Barang (%) (IPB)	Skor
IPB \geq 20	0,68
10 \leq IPB $<$ 20	0,568
0 \leq IPB $<$ 10	0,456
-10 \leq IPB $<$ 0	0,344
-40 \leq IPB $<$ -10	0,232
IPB $<$ -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan persetujuan izin pemasukan barang tahun (20xx-1) sebanyak 66 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 70 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 6,06 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,456.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

5) Pelayanan rekomendasi.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan rekomendasi.

R0 = realisasi pelayanan rekomendasi yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan rekomendasi yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Rekomendasi (%) (Rekom)	Skor
Rekom \geq 20	0,64
10 \leq Rekom $<$ 20	0,528
0 \leq Rekom $<$ 10	0,416
-10 \leq Rekom $<$ 0	0,304
-40 \leq Rekom $<$ -10	0,192
Rekom $<$ -40	0,08

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan persetujuan rekomendasi tahun (20xx-1) sebanyak 108 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 118 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 9,26 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,416.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

6) Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA).

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA).

R0 = realisasi Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Surat Keterangan Asal (%) (SKA)	Skor
SKA \geq 20	0,68
10 \leq SKA $<$ 20	0,568
0 \leq SKA $<$ 10	0,456
-10 \leq SKA $<$ 0	0,344
-40 \leq SKA $<$ -10	0,232
SKA $<$ -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) tahun (20xx-1) sebanyak 66 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 75 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 13,64 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,568.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

d. Layanan pembangunan sarana dan prasarana

1) Pelayanan Izin Penempatan Reklame (IPR).

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan Izin Penempatan Reklame (IPR).

R0 = realisasi Izin Penempatan Reklame (IPR) yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi Izin Penempatan Reklame (IPR) yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian persetujuan Izin Penempatan Reklame (IPR) adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Izin Penempatan Reklame (%) (IPR)	Skor
IPR \geq 20	0,92
10 \leq IPR $<$ 20	0,848
0 \leq IPR $<$ 10	0,784
-10 \leq IPR $<$ 0	0,72
-40 \leq IPR $<$ -10	0,656
IPR $<$ -40	0,592

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan penerbitan persetujuan Izin Penempatan Reklame (IPR) tahun (20xx-1) sebanyak 66 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 75 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 13,64 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,848.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

- 2) Pelayanan penyediaan bibit pohon penghijauan.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan Penyediaan Bibit Pohon Penghijauan (PBPP).

R0 = realisasi Penyediaan Bibit Pohon Penghijauan (PBPP) yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi Penyediaan Bibit Pohon Penghijauan (PBPP) yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian layanan penyediaan bibit pohon penghijauan adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Penyediaan Bibit Pohon Penghijauan (%) (PBPP)	Skor
PBPP \geq 20	0,88
10 \leq PBPP $<$ 20	0,82
0 \leq PBPP $<$ 10	0,76
-10 \leq PBPP $<$ 0	0,7
-40 \leq PBPP $<$ -10	0,64
PBPP $<$ -40	0,58

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan penyediaan bibit pohon penghijauan tahun (20xx-1) sebanyak 2.500 pohon dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 2.500 pohon. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 0 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,76.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

- 3) Pelayanan izin penggunaan sementara bagian ROW/Buffer.
Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan Izin Penggunaan Sementara Bagian ROW/Buffer (IPSB).

R0 = realisasi Izin Penggunaan Sementara Bagian ROW/Buffer (IPSB) yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi Izin Penggunaan Sementara Bagian ROW/Buffer (IPSB) yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian layanan izin penggunaan sementara bagian ROW/Buffer (IPSB) adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Izin Penggunaan Sementara Bagian ROW/Buffer (%) (IPSB)	Skor
IPSB \geq 20	0,88
10 \leq IPSB $<$ 20	0,82
0 \leq IPSB $<$ 10	0,76
-10 \leq IPSB $<$ 0	0,7
-40 \leq IPSB $<$ -10	0,64
IPSB $<$ -40	0,58

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan izin penggunaan sementara bagian ROW/Buffer tahun (20xx-1) sebanyak 20 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 25 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 25 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,88.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

- 4) Layanan persetujuan izin pematangan lahan.
Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan perizinan pematangan lahan.

R0 = realisasi izin pematangan lahan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi izin pematangan lahan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian persetujuan izin pematangan lahan adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Perizinan Pematangan Lahan (%) (PIPL)	Skor
PIPL \geq 20	1,32
10 \leq PIPL $<$ 20	1,16
0 \leq PIPL $<$ 10	1,02
-10 \leq PIPL $<$ 0	0,88
-40 \leq PIPL $<$ -10	0,78
PIPL $<$ -40	0,64

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan persetujuan izin pematangan lahan tahun (20xx-1) sebanyak 120 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 128 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 6,67 % sehingga diperoleh skor sebesar 1,02.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

e. Layanan pemanfaatan aset

1) Pelayanan sewa kamar rumah susun.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan sewa kamar rumah susun.

R0 = realisasi pelayanan sewa kamar rumah susun tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan sewa kamar rumah susun tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian layanan pelayanan sewa kamar rumah susun adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Sewa Kamar Rumah Susun (%) (RUSUN)	Skor
RUSUN \geq 20	0,6
10 \leq RUSUN $<$ 20	0,5
0 \leq RUSUN $<$ 10	0,4
-10 \leq RUSUN $<$ 0	0,3
-40 \leq RUSUN $<$ -10	0,2
RUSUN $<$ -40	0,1

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan sewa kamar rumah susun tahun (20xx-1) sebanyak 400 kamar dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 440 kamar. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 10 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,5.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

2) Pelayanan penerbitan Surat Penempatan Lokasi KSB.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan Pelayanan Penerbitan Surat Penempatan Lokasi KSB

R0 = realisasi Pelayanan Penerbitan Surat Penempatan Lokasi KSB yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi Pelayanan Penerbitan Surat Penempatan Lokasi KSB yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pelayanan penerbitan Surat Penempatan Lokasi KSB adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Penerbitan Surat Penempatan Lokasi KSB (%) (PSPL)	Skor
PSPL \geq 20	0,88
10 \leq PSPL $<$ 20	0,82
0 \leq PSPL $<$ 10	0,76
-10 \leq PSPL $<$ 0	0,6
-40 \leq PSPL $<$ -10	0,64
PSPL $<$ -40	0,58

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan Penerbitan Surat Penempatan Lokasi KSB tahun (20xx-1) sebanyak 70 surat dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 75 surat. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 7,14 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,76.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

3) Pelayanan pembayaran UWTO KSB.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan pembayaran UWTO KSB.

R0 = realisasi pembayaran UWTO KSB yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pembayaran UWTO KSB yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian layanan pembayaran UWTO KSB adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Pembayaran UWTO KSB (%) (UWTO-KSB)	Skor
UWTO-KSB \geq 20	0,92
10 \leq UWTO-KSB $<$ 20	0,848
0 \leq UWTO-KSB $<$ 10	0,784
-10 \leq UWTO-KSB $<$ 0	0,72
-40 \leq UWTO-KSB $<$ -10	0,656
UWTO-KSB $<$ -40	0,592

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan pembayaran UWTO KSB tahun (20xx-1) sebanyak 70 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 75 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 7,14 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,784.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

- 4) Pelayanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu.

R0 = realisasi pelayanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pelayanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu (%) (UWTO BA)	Skor
UWTO BA \geq 20	0,88
10 \leq UWTO BA $<$ 20	0,82
0 \leq UWTO BA $<$ 10	0,76
-10 \leq UWTO BA $<$ 0	0,6
-40 \leq UWTO BA $<$ -10	0,64
UWTO BA $<$ -40	0,58

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu tahun (20xx-1) sebanyak 70 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 75 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 7,14 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,76.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

- 5) Pelayanan pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing.

R0 = realisasi pelayanan pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Pemanfaatan Kandang dan Tapak Kandang Sapi dan Kambing (%) (KANDANG)	Skor
KANDANG \geq 20	0,92
10 \leq KANDANG $<$ 20	0,848
0 \leq KANDANG $<$ 10	0,784
-10 \leq KANDANG $<$ 0	0,72
-40 \leq KANDANG $<$ -10	0,656
KANDANG $<$ -40	0,592

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing tahun (20xx-1) sebanyak 50 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 55 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 10 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,848.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

6) Pelayanan jasa pemotongan sapi dan kambing.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa pemotongan sapi dan kambing.

R0 = realisasi pelayanan jasa pemotongan sapi dan kambing tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan jasa pemotongan sapi dan kambing tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan jasa pemotongan sapi dan kambing adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Pemotongan Sapi dan Kambing (%) (POTONG)	Skor
POTONG \geq 20	0,88
10 \leq POTONG $<$ 20	0,82
0 \leq POTONG $<$ 10	0,76
-10 \leq POTONG $<$ 0	0,6
-40 \leq POTONG $<$ -10	0,64
POTONG $<$ -40	0,58

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data Pelayanan Jasa Pemotongan Sapi dan Kambing tahun (20xx-1) sebanyak 1.200 ekor dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 1.300 ekor. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 8,33% sehingga diperoleh skor sebesar 0,76.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

7) Pelayanan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan.

R0 = realisasi pelayanan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Pemanfaatan Lahan Untuk Pertanian dan Perikanan (%) (PLPP)	Skor
PLPP \geq 20	0,92
10 \leq PLPP $<$ 20	0,848
0 \leq PLPP $<$ 10	0,784
-10 \leq PLPP $<$ 0	0,72
-40 \leq PLPP $<$ -10	0,656
PLPP $<$ -40	0,592

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan tahun (20xx-1) sebanyak 12.000 m² dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 14.000 m² sehingga lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan berjumlah 26.000 m². Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 16,67% sehingga diperoleh skor sebesar 0,848.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

f. Layanan pengelolaan air dan limbah

1) Pelayanan rekomendasi sambungan air bersih.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan rekomendasi sambungan air bersih.

R0 = realisasi pelayanan rekomendasi sambungan air bersih tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan rekomendasi sambungan air bersih tahun yang dihitung.

Da

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan rekomendasi sambungan air bersih adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Rekomendasi Sambungan Air Bersih (%) (AIR)	Skor
AIR \geq 20	0,864
10 \leq AIR $<$ 20	0,744
0 \leq AIR $<$ 10	0,624
-10 \leq AIR $<$ 0	0,544
-40 \leq AIR $<$ -10	0,424
AIR $<$ -40	0,324

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan rekomendasi sambungan air bersih tahun (20xx-1) sebanyak 66 sambungan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 75 sambungan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 13,64 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,744.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

- 2) Pelayanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja).

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja).

R0 = realisasi pelayanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja) tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja) tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja) adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Pengurusan <i>Septic Tank</i> (Sumur Tinja) (%) (JPST)	Skor
JPST \geq 20	0,784
10 \leq JPST $<$ 20	0,664
0 \leq JPST $<$ 10	0,584
-10 \leq JPST $<$ 0	0,504
-40 \leq JPST $<$ -10	0,384
JPST $<$ -40	0,304

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja) tahun (20xx-1) sebanyak 66 *septic tank* dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 75 *septic tank*. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 13,64 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,664.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

3) Pelayanan jasa pengolahan limbah domestik.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa pengolahan limbah domestik.

R0 = realisasi pelayanan jasa pengolahan limbah domestik tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan jasa pengolahan limbah domestik tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pelayanan jasa pengolahan limbah domestik adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Pengolahan Limbah Domestik (%) (JPLD)	Skor
JPLD \geq 20	0,784
10 \leq JPLD $<$ 20	0,664
0 \leq JPLD $<$ 10	0,584
-10 \leq JPLD $<$ 0	0,504
-40 \leq JPLD $<$ -10	0,384
JPLD $<$ -40	0,304

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan jasa pengolahan limbah domestik tahun (20xx-1) sebanyak 66 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 75 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 13,64 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,664.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

4) Pelayanan izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan izin pengelola pembuangan Limbah ke IPAL domestik.

R0 = realisasi pelayanan izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Izin Pengelola Pembuangan Limbah ke IPAL Domestik (%) (IPAL)	Skor
IPAL \geq 20	0,784
10 \leq IPAL $<$ 20	0,664
0 \leq IPAL $<$ 10	0,584
-10 \leq IPAL $<$ 0	0,504
-40 \leq IPAL $<$ -10	0,384
IPAL $<$ -40	0,304

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik tahun (20xx-1) sebanyak 66 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 80 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 21,21 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,784.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

5) Pelayanan sewa lahan KPLI-B3 Kabil.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan sewa lahan KPLI-B3 Kabil.

R0 = realisasi pelayanan sewa lahan KPLI-B3 Kabil tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan sewa lahan KPLI-B3 Kabil tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan sewa lahan KPLI-B3 Kabil adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Sewa Lahan KPLI-B3 Kabil (%) (KABIL)	Skor
KABIL \geq 20	0,784
10 \leq KABIL $<$ 20	0,664
0 \leq KABIL $<$ 10	0,584
-10 \leq KABIL $<$ 0	0,504
-40 \leq KABIL $<$ -10	0,384
KABIL $<$ -40	0,304

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data pelayanan sewa lahan KPLI-B3 Kabil tahun (20xx-1) sebanyak 66 layanan (lokasi/lahan/m²) dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 75 layanan (lokasi/lahan/m²). Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 13,64 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,664.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

g. Layanan pelabuhan laut.

1) Pelayanan jasa kapal.

Pelayanan jasa kapal adalah layanan jasa labuh, jasa tambat, jasa tunda, jasa pandu dan jasa penyediaan air tawar ke kapal. Pertumbuhan pelayanan kapal dihitung dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan Pelayanan Jasa Kapal.

R0 = realisasi jumlah kapal yang dapat dilayani tahun sebelumnya.
(jumlah kapal kargo baik kontainer maupun non kontainer).

R1 = realisasi jumlah kapal yang dapat dilayani tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan jasa kapal adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Kapal (%) (PJK)	Skor
$PJK \geq 20$	2
$10 < PJK < 20$	1,64
$0 < PJK < 10$	1,32
$-10 < PJK < 0$	1
$-40 < PJK < -10$	0,64
$PJK < -40$	0,32

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data pelayanan jasa kapal tahun (20xx-1) sebanyak 256 kapal dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 275 kapal. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 7,42 % sehingga diperoleh skor sebesar 1,32.

2) Pelayanan jasa barang.

Pelayanan jasa barang adalah layanan jasa bongkar muat barang, baik dari dan ke kapal, dermaga dan lapangan penumpukan. Pertumbuhan pelayanan jasa barang dihitung dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa bongkar muat barang.

R0 = realisasi jumlah barang yang dibongkar muat tahun sebelumnya.

(jumlah barang dalam tonage baik dalam kontainer maupun non kontainer).

R1 = realisasi jumlah barang yang dibongkar muat tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan jasa bongkar muat barang adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang (%) (PBM)	Skor
$PBM \geq 20$	2
$10 < PBM < 20$	1,64
$0 < PBM < 10$	1,32
$-10 < PBM < 0$	1
$-40 < PBM < -10$	0,64
$PBM < -40$	0,32

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data pelayanan jasa bongkar muat barang tahun (20xx-1) sebanyak 2.560 ton dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 2.750 ton. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 7,42 % sehingga diperoleh skor sebesar 1,32.

3) Pelayanan sewa alat.

Pertumbuhan pelayanan jasa sewa alat dihitung dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa sewa alat.

R0 = realisasi jumlah pelayanan jasa sewa alat tahun sebelumnya.

R1 = realisasi jumlah pelayanan jasa sewa alat yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian layanan jasa sewa alat adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Sewa Alat (%) (SEWA)	Skor
SEWA \geq 20	0,8
10 \leq SEWA < 20	0,64
0 \leq SEWA < 10	0,5
-10 \leq SEWA < 0	0,36
-40 \leq SEWA < -10	0,26
SEWA < -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data peralatan yang disewakan tahun (20xx-1) sebanyak 12 alat dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 13 alat. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 8,33 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,5.

4) Pelayanan jasa penumpang.

Pertumbuhan pelayanan jasa penumpang dihitung dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa penumpang.

R0 = realisasi jumlah penumpang tahun sebelumnya.

R1 = realisasi jumlah penumpang yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian layanan jasa penumpang adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Penumpang (%) (PJP)	Skor
PJP \geq 20	0,8
10 \leq PJP < 20	0,64
0 \leq PJP < 10	0,5
-10 \leq PJP < 0	0,36
-40 \leq PJP < -10	0,26
PJP < -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data pelayanan jasa penumpang tahun (20xx-1) sebanyak 5.560 penumpang dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 5.750 penumpang. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 3,42 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,5.

5) Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya.

Pertumbuhan Pelayanan Jasa Kepelabuhan lainnya dihitung dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa kepelabuhan lainnya.

R0 = realisasi jumlah pelayanan jasa kepelabuhan lainnya tahun sebelumnya.

R1 = realisasi jumlah pelayanan jasa kepelabuhan lainnya yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan lainnya adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Kepelabuhan Lainnya (%) (PJKL)	Skor
PJKL \geq 20	0,8
10 \leq PJKL $<$ 20	0,64
0 \leq PJKL $<$ 10	0,5
-10 \leq PJKL $<$ 0	0,36
-40 \leq PJKL $<$ -10	0,26
PJKL $<$ -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data pelayanan jasa kepelabuhan lainnya tahun (20xx-1) sebanyak 5 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 5 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 0,00 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,5.

h. Layanan bandar udara.

1) Pelayanan jasa aeronautika non ATS.

Pelayanan jasa aeronautika non ATS adalah jasa layanan untuk jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U/ton), jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U/pax), jasa pemakaian *counter* (*Check in Counter/pax*), dan jasa pemakaian garbarata (*aviobridge/ton*).

Pertumbuhan Pelayanan jasa aeronautika non ATS dihitung dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa aeronautika non ATS.

R0 = realisasi jumlah pelayanan jasa aeronautika non ATS tahun sebelumnya.

R1 = realisasi jumlah pelayanan jasa aeronautika non ATS yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan jasa aeronautika non ATS adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Aeronautika Non ATS (%) (non ATS)	Skor
non ATS \geq 20	2,4
10 \leq non ATS $<$ 20	2,08
0 \leq non ATS $<$ 10	1,8
-10 \leq non ATS $<$ 0	1,6
-40 \leq non ATS $<$ -10	1,32
non ATS $<$ -40	1,064

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data pelayanan jasa aeronautika non ATS tahun (20xx-1) sebanyak 6125 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 6540 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 6,77 % sehingga diperoleh skor sebesar 1,8.

2) Pelayanan jasa non aeronautika.

Pelayanan Jasa Non Aeronautika adalah jasa penunjang penerbangan dan jasa penunjang Bandar udara, yang meliputi parker, sewa ruang, kargo, dsb.

Pertumbuhan Pelayanan jasa non aeronautika dihitung dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa non aeronautika.

R0 = realisasi jumlah pelayanan jasa non aeronautika tahun sebelumnya.

R1 = realisasi jumlah pelayanan jasa non aeronautika yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan jasa non aeronautika adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Non Aeronautika (%) (non)	Skor
non \geq 20	1,6
10 \leq non $<$ 20	1,44
0 \leq non $<$ 10	1,3
-10 \leq non $<$ 0	1,16
-40 \leq non $<$ -10	1,06
non $<$ -40	0,92

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data pelayanan jasa pendukung tahun (20xx-1) sebanyak 1125 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 1540 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 36,89 % sehingga diperoleh skor sebesar 1,6.

i. Layanan rumah sakit.

1) *Bed Occupancy Rate*.

Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu jumlah atau tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit atau dapat memberikan gambaran tinggi-rendahnya penggunaan tempat tidur suatu rumah sakit.

BOR dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah total hari perawatan seluruh pasien selama setahun}}{\text{Jumlah hari x tempat tidur}} \times 100\%$$

Penjelasan:

BOR dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah total hari perawatan dari keseluruhan pasien rawat inap dalam setahun dibagi dengan jumlah tempat tidur yang ada, hasilnya dibagi dengan jumlah hari dalam tahun. BOR yang Ideal untuk suatu rumah sakit adalah 60-80%.

Pertumbuhan BOR dengan rumus:

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan BOR.

R0 = jumlah BOR tahun sebelumnya.

R1 = jumlah BOR tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan rekam medik adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah BOR (%) (BOR)	Skor
BOR \geq 20	1,6
10 \leq BOR $<$ 20	1,28
0 \leq BOR $<$ 10	1
-10 \leq BOR $<$ 0	0,8
-40 \leq BOR $<$ -10	0,52
BOR $<$ -40	0,264

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data BOR tahun (20xx-1) sebanyak 60 % dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 64 %. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 6,67 % sehingga diperoleh skor sebesar 1.

2) Pelayanan *persalinan* dan perinatologi.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan persalinan dan perinatologi.

R0 = realisasi rata-rata pelayanan persalinan dan perinatologi per hari tahun sebelumnya.

R1 = realisasi rata-rata pelayanan persalinan dan perinatologi per hari tahun yang dihitung.

Rata-rata Pelayanan Persalinan dan Perinatologi per hari dihitung berdasarkan jumlah Pelayanan Persalinan dan Perinatologi selama satu tahun dibagi dengan jumlah hari kerja di unit pelayanan persalinan dan perinatologi dengan formula:

Jumlah tindakan persalinan dan perinatologi
selama satu tahun

Jumlah hari kerja unit layanan persalinan dan
perinatologi dalam tahun yang sama

Skor pertumbuhan layanan persalinan dan perinatologi adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Pelayanan Persalinan dan Perinatologi (%) (PPP)	Skor
PPP \geq 20	0,8
10 \leq PPP < 20	0,64
0 \leq PPP < 10	0,5
-10 \leq PPP < 0	0,36
-40 \leq PPP < -10	0,26
PPP < -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan persalinan dan perinatologi per hari tahun (20xx-1) sebanyak 8 dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 11. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 37,50% sehingga diperoleh skor sebesar 0,8. (catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

3) Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pengolahan limbah rumah sakit.

R0 = realisasi pengolahan limbah rumah sakit tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pengolahan limbah rumah sakit tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan IGD adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pengolahan Limbah Rumah Sakit (%) (PLRS)	Skor
PLRS \geq 20	0,8
10 \leq PLRS $<$ 20	0,64
0 \leq PLRS $<$ 10	0,5
-10 \leq PLRS $<$ 0	0,36
-40 \leq PLRS $<$ -10	0,26
PLRS $<$ -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data realisasi pengolahan limbah tahun (20xx-1) sebanyak 500 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 540 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 8,00% sehingga diperoleh skor sebesar 0,5.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

4) Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI).

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI).

R0 = realisasi pencegahan pengendalian infeksi tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pencegahan pengendalian infeksi tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pencegahan pengendalian infeksi adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pencegahan Pengendalian Infeksi (%) (PPI)	Skor
PPI \geq 20	0,8
10 \leq PPI $<$ 20	0,64
0 \leq PPI $<$ 10	0,5
-10 \leq PPI $<$ 0	0,36
-40 \leq PPI $<$ -10	0,26
PPI $<$ -40	0,12

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data pencegahan pengendalian infeksi tahun (20xx-1) sebanyak 120 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 122 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 1,67 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,5.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

j. Layanan teknologi informasi.

1) Pelayanan pengembangan sistem informasi terhadap bisnis Proses BP Batam.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan pengembangan sistem informasi terhadap bisnis proses BP Batam.

R0 = realisasi pelayanan pengembangan sistem informasi terhadap bisnis proses BP Batam tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan pengembangan sistem informasi terhadap bisnis proses BP Batam tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pelayanan pengembangan sistem informasi terhadap bisnis proses BP Batam adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Pengembangan Sistem Informasi terhadap Bisnis Proses BP Batam (%) (PSI)	Skor
PSI \geq 20	0,8
10 \leq PSI < 20	0,64
0 \leq PSI < 10	0,50
-10 \leq PSI < 0	0,36
-40 \leq PSI < -10	0,26
PSI < -40	0,14

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan Pengembangan Sistem Informasi terhadap Bisnis Proses BP Batam tahun (20xx-1) sebanyak 22 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 28 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 36,37 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,8.

(catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

2) Pelayanan *data center* BP Batam.

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan *data center* BP Batam.

R0 = realisasi pelayanan *data center* BP Batam tahun sebelumnya.

R1 = realisasi pelayanan *data center* BP Batam tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pelayanan *data center* BP Batam adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan <i>Data Centre</i> BP Batam (%) (PDC)	Skor
PDC \geq 20	0,8
10 \leq PDC < 20	0,64
0 \leq PDC < 10	0,50
-10 \leq PDC < 0	0,36
-40 \leq PDC < -10	0,26
PDC < -40	0,14

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data layanan *data center* BP Batam tahun (20xx-1) sebanyak 22 layanan dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 28 layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 27,27 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,8. (catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

2. Efisiensi Layanan

a. Layanan pengelolaan lahan.

1) Pelayanan izin alokasi lahan.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian izin alokasi lahan sama dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi pemberian persetujuan izin alokasi lahan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Izin Alokasi Lahan (IAL)	Skor
$IAL > 1,10$	0,13
$1,00 < IAL \leq 1,10$	0,26
$0,90 < IAL \leq 1,00$	0,4
$0,75 < IAL \leq 0,90$	0,5
$0,50 < IAL \leq 0,75$	0,64
$IAL \leq 0,50$	0,8

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian izin prinsip alokasi lahan adalah 4,5 hari pada tahun 20xx dan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap permohonan izin adalah selama 4 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,125 sehingga diperoleh skor sebesar 0,132.

2) Pelayanan rekomendasi hak atas tanah.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian izin (pemberian rekomendasi hak atas tanah) sama dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi pemberian persetujuan izin pemberian rekomendasi hak atas tanah adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Rekomendasi Hak atas Tanah (RHAT)	Skor
RHAT > 1,10	0,06
1,00 < RHAT ≤ 1,10	0,13
0,90 < RHAT ≤ 1,00	0,18
0,75 < RHAT ≤ 0,90	0,25
0,50 < RHAT ≤ 0,75	0,32
RHAT ≤ 0,50	0,4

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian rekomendasi hak atas tanah adalah 5 hari pada tahun 20xx dan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap permohonan izin adalah selama 4 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,25 sehingga diperoleh skor sebesar 0,06.

3) Pelayanan izin peralihan hak.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian izin peralihan hak sama dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi pemberian persetujuan izin peralihan hak adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Izin Peralihan Hak (PiPH)	Skor
$PIPH > 1,10$	0,06
$1,00 < PIPH \leq 1,10$	0,13
$0,90 < PIPH \leq 1,00$	0,18
$0,75 < PIPH \leq 0,90$	0,25
$0,50 < PIPH \leq 0,75$	0,32
$PIPH \leq 0,50$	0,4

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian Izin Peralihan Hak adalah 13 hari pada tahun 20xx dan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap permohonan izin adalah selama 12 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,08, sehingga diperoleh skor sebesar 0,13.

- 4) Pelayanan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).
Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian izin perpanjangan uang wajib tahunan otorita (UWTO) dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi pemberian persetujuan izin pematangan lahan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Izin Perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) (P-UWTO)	Skor
$P-UWTO > 1,10$	0,06
$1,00 < P-UWTO \leq 1,10$	0,13
$0,90 < P-UWTO \leq 1,00$	0,18
$0,75 < P-UWTO \leq 0,90$	0,25
$0,50 < P-UWTO \leq 0,75$	0,32
$P-UWTO \leq 0,50$	0,4

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian izin perpanjangan uang wajib tahunan otorita (UWTO) adalah 3 hari pada tahun 20xx dan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap permohonan izin adalah selama 3 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,0 sehingga diperoleh skor sebesar 0,18.

- b. Layanan perencanaan teknik.
Layanan persetujuan izin fatwa planologi.
Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian untuk setiap izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian izin fatwa planologi dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi pemberian persetujuan izin fatwa planologi adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Persetujuan Izin Fatwa Planologi (PIFP)	Skor
PIFP > 1,10	0,66
1,00 < PIFP ≤ 1,10	0,73
0,90 < PIFP ≤ 1,00	0,78
0,75 < PIFP ≤ 0,90	0,85
0,50 < PIFP ≤ 0,75	0,92
PIFP ≤ 0,50	1

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian izin fatwa planologi adalah 5 hari pada tahun 20xx dan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap permohonan izin adalah selama 6 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,83, sehingga diperoleh skor sebesar 0,85.

- c. Layanan lalu lintas barang.
1) Pelayanan izin usaha (registrasi usaha).
Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan penerbitan izin usaha (registrasi usaha) dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin usaha (registrasi usaha) yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan izin usaha (registrasi usaha) adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Izin Usaha Registrasi Usaha (IU)	Skor
$IU > 1,10$	0,06
$1,00 < IU \leq 1,10$	0,116
$0,90 < IU \leq 1,00$	0,172
$0,75 < IU \leq 0,90$	0,228
$0,50 < IU \leq 0,75$	0,284
$IU \leq 0,50$	0,34

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan izin usaha (registrasi usaha) tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 8 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan izin usaha (registrasi usaha) adalah selama 10 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,80 sehingga diperoleh skor sebesar 0,228.

2) Pelayanan Importir Terdaftar (IT).

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan penerbitan izin importir terdaftar dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin importir terdaftar yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan izin importir terdaftar adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar (PIT)	Skor
$PIT > 1,10$	0,04
$1,00 < PIT \leq 1,10$	0,096
$0,90 < PIT \leq 1,00$	0,152
$0,75 < PIT \leq 0,90$	0,208
$0,50 < PIT \leq 0,75$	0,264
$PIT \leq 0,50$	0,32

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan izin importir terdaftar tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 8 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan izin importir terdaftar adalah selama 10 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,80 sehingga diperoleh skor sebesar 2,08.

- 3) Pelayanan penetapan Importir Terdaftar Produk Tertentu (ITPT).
Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan penerbitan izin penetapan importir terdaftar produk tertentu dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin penetapan importir produk tertentu yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan izin penetapan importir terdaftar produk tertentu adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar Produk Tertentu (ITPT)	Skor
ITPT > 1,10	0,06
1,00 < ITPT ≤ 1,10	0,116
0,90 < ITPT ≤ 1,00	0,172
0,75 < ITPT ≤ 0,90	0,228
0,50 < ITPT ≤ 0,75	0,284
ITPT ≤ 0,50	0,34

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan izin importir terdaftar produk tertentu tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 8 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan izin importir terdaftar produk tertentu adalah selama 10 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,80 sehingga diperoleh skor sebesar 0,228.

- 4) Pelayanan Izin Pemasukan Barang (IPB).
Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan penerbitan izin pemasukan barang dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin pemasukan barang yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan izin pemasukan barang adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Izin Pemasukan Barang (IPB)	Skor
IPB > 1,10	0,06
1,00 < IPB ≤ 1,10	0,116
0,90 < IPB ≤ 1,00	0,172
0,75 < IPB ≤ 0,90	0,228
0,50 < IPB ≤ 0,75	0,284
IPB ≤ 0,50	0,34

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan izin pemasukan barang tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 3 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan izin pemasukan barang adalah selama 4 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,75 sehingga diperoleh skor sebesar 0,284.

5) Pelayanan rekomendasi.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan penerbitan surat rekomendasi dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan surat rekomendasi yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap surat yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen surat rekomendasi yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

A

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan surat rekomendasi adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Rekomendasi (Rekom)	Skor
Rekom > 1,10	0,04
1,00 < Rekom ≤ 1,10	0,096
0,90 < Rekom ≤ 1,00	0,152
0,75 < Rekom ≤ 0,90	0,208
0,50 < Rekom ≤ 0,75	0,264
Rekom ≤ 0,50	0,32

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan surat rekomendasi tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 8 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan surat rekomendasi adalah selama 10 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,80 sehingga diperoleh skor sebesar 0,208.

6) Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA).

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan penerbitan surat keterangan asal dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan surat keterangan asal, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap surat yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah surat keterangan asal yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan surat keterangan asal adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA)	Skor
SKA > 1,10	0,06
1,00 < SKA ≤ 1,10	0,116
0,90 < SKA ≤ 1,00	0,172
0,75 < SKA ≤ 0,90	0,228
0,50 < SKA ≤ 0,75	0,284
SKA ≤ 0,50	0,34

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan surat keterangan asal tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 5 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan surat keterangan asal adalah selama 8 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,625 sehingga diperoleh skor sebesar 0,284.

- d. Layanan pembangunan prasaranan dan sarana
 1) Pelayanan izin penempatan reklame.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan izin penempatan reklame dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin penempatan reklame, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap surat yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah surat izin penempatan reklame yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan surat izin penempatan reklame adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Izin Penempatan Reklame (IPR)	Skor
IPR > 1,10	0,296
1,00 < IPR ≤ 1,10	0,328
0,90 < IPR ≤ 1,00	0,36
0,75 < IPR ≤ 0,90	0,392
0,50 < IPR ≤ 0,75	0,424
IPR ≤ 0,50	0,46

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan surat izin penempatan reklame tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 5 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan surat izin penempatan reklame adalah selama 8 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,625 sehingga diperoleh skor sebesar 0,424.

- 2) Pelayanan penyediaan bibit pohon penghijauan.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan izin penyediaan bibit pohon penghijauan dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin penyediaan bibit pohon penghijauan, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap surat yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah izin penyediaan bibit pohon penghijauan yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan surat izin penyediaan bibit pohon penghijauan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Penyediaan Bibit Pohon Penghijauan (PBPP)	Skor
PBPP > 1,10	0,29
1,00 < PBPP ≤ 1,10	0,32
0,90 < PBPP ≤ 1,00	0,35
0,75 < PBPP ≤ 0,90	0,38
0,50 < PBPP ≤ 0,75	0,41
PBPP ≤ 0,50	0,44

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan surat izin penyediaan bibit pohon penghijauan tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 4 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan surat izin penyediaan bibit pohon penghijauan adalah selama 6 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,41.

3) Pelayanan izin penggunaan sementara bagian ROW/Buffer.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan izin penggunaan sementara bagian ROW/Buffer dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin penggunaan sementara bagian ROW/Buffer, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap surat yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah izin penggunaan sementara bagian ROW/Buffer yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan surat izin penggunaan sementara bagian ROW/Buffer adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Izin Penggunaan Sementara Bagian ROW/Buffer (IPSB)	Skor
IPSB > 1,10	0,29
1,00 < IPSB ≤ 1,10	0,32
0,90 < IPSB ≤ 1,00	0,35
0,75 < IPSB ≤ 0,90	0,38
0,50 < IPSB ≤ 0,75	0,41
IPSB ≤ 0,50	0,44

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan surat izin penggunaan sementara bagian ROW/Buffer tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 4 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan surat izin penggunaan sementara bagian ROW/Buffer adalah selama 6 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,41.

- 4) Layanan persetujuan izin pematangan lahan.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian izin pematangan lahan dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi pemberian persetujuan izin pematangan lahan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Persetujuan Izin Pematangan Lahan (PIPL)	Skor
PIPL > 1,10	0,32
1,00 < PIPL ≤ 1,10	0,39
0,90 < PIPL ≤ 1,00	0,44
0,75 < PIPL ≤ 0,90	0,51
0,50 < PIPL ≤ 0,75	0,58
PIPL ≤ 0,50	0,66

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian izin perpanjangan uang wajib tahunan otorita (UWTO) adalah 4 hari pada tahun 20xx dan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap permohonan izin adalah selama 5 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,8, sehingga diperoleh skor sebesar 0,51.

- e. Layanan pemanfaatan aset.

- 1) Pelayanan sewa kamar rumah susun.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan izin sewa kamar rumah susun dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan dokumen tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap surat yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah penerbitan dokumen izin sewa rumah susun yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penyelesaian izin sewa kamar rumah susun adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Sewa Kamar Rumah Susun (RUSUN)	Skor
RUSUN > 1,10	0,05
1,00 < RUSUN ≤ 1,10	0,1
0,90 < RUSUN ≤ 1,00	0,15
0,75 < RUSUN ≤ 0,90	0,2
0,50 < RUSUN ≤ 0,75	0,25
RUSUN ≤ 0,50	0,3

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan izin sewa kamar rumah susun tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 2 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan izin sewa kamar rumah susun adalah selama 3 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,25.

- 2) Pelayanan penerbitan surat penempatan lokasi KSB.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan izin penerbitan surat penempatan lokasi KSB dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin penerbitan surat penempatan lokasi KSB, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap surat yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah izin penerbitan surat penempatan lokasi KSB yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan surat penempatan lokasi KSB adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Penerbitan Surat Penempatan Lokasi KSB (PSPL)	Skor
PSPL > 1,10	0,29
1,00 < PSPL ≤ 1,10	0,32
0,90 < PSPL ≤ 1,00	0,35
0,75 < PSPL ≤ 0,90	0,38
0,50 < PSPL ≤ 0,75	0,41
PSPL ≤ 0,50	0,44

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan surat penempatan lokasi KSB tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 4 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan surat penempatan lokasi KSB adalah selama 6 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,41.

3) Pelayanan pembayaran UWTO KSB.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan pembayaran UWTO KSB dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan dokumen pembayaran tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap surat yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah penerbitan dokumen pembayaran UWTO KSB yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan dokumen pembayaran UWTO KSB adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Pembayaran UWTO KSB (UWTO-KSB)	Skor
UWTO-KSB > 1,10	0,296
1,00 < UWTO-KSB ≤ 1,10	0,328
0,90 < UWTO-KSB ≤ 1,00	0,36
0,75 < UWTO-KSB ≤ 0,90	0,392
0,50 < UWTO-KSB ≤ 0,75	0,424
UWTO-KSB ≤ 0,50	0,46

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penerbitan dokumen pembayaran UWTO KSB tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 2 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan dokumen pembayaran UWTO KSB adalah selama 2 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,00 sehingga diperoleh skor sebesar 0,36.

- 4) Pelayanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu.
Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan dokumen tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap surat yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah penerbitan dokumen penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu (UWTO-KSB BA)	Skor
UWTO-KSB BA > 1,10	0,29
1,00 < UWTO-KSB BA ≤ 1,10	0,32
0,90 < UWTO-KSB BA ≤ 1,00	0,35
0,75 < UWTO-KSB BA ≤ 0,90	0,38
0,50 < UWTO-KSB BA ≤ 0,75	0,41
UWTO-KSB BA ≤ 0,50	0,44

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 2 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penyelesaian UWTO KSB plus Bida Ayu adalah selama 3 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,41.

- 5) Pelayanan pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan izin pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan dokumen tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap surat yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah penerbitan dokumen izin pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penyelesaian izin pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Pemanfaatan Kandang dan Tapak Kandang Sapi dan Kambing (KANDANG)	Skor
KANDANG > 1,10	0,296
1,00 < KANDANG ≤ 1,10	0,328
0,90 < KANDANG ≤ 1,00	0,36
0,75 < KANDANG ≤ 0,90	0,392
0,50 < KANDANG ≤ 0,75	0,424
KANDANG ≤ 0,50	0,46

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan izin pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 2 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan izin pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing adalah selama 3 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,424.

- 6) Pelayanan jasa pemotongan sapi dan kambing.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian jasa}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

h

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan jasa pemotongan sapi dan kambing dihitung dengan jumlah waktu dalam setahun untuk menyelesaikan jasa tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap jasa yang dikerjakan selama setahun dibagi jumlah layanan jasa pemotongan sapi dan kambing yang dikerjakan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah jasa yang dikerjakan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan jasa pemotongan sapi dan kambing adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Jasa Pemotongan Sapi dan Kambing (POTONG)	Skor
POTONG > 1,10	0,29
1,00 < POTONG ≤ 1,10	0,32
0,90 < POTONG ≤ 1,00	0,35
0,75 < POTONG ≤ 0,90	0,38
0,50 < POTONG ≤ 0,75	0,41
POTONG ≤ 0,50	0,44

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil jasa pemotongan sapi dan kambing tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 2 jam per ekor per jasa layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan jasa pemotongan sapi dan kambing adalah selama 3 jam per ekor per jasa layanan. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,41.

- 7) Pelayanan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan.
Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian jasa}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan izin pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan dihitung dengan jumlah waktu dalam setahun untuk menyelesaikan layanan tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap layanan yang dikerjakan selama setahun dibagi jumlah layanan izin pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan yang dikerjakan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah jasa yang dikerjakan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan izin pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Pemanfaatan Lahan Untuk Pertanian dan Perikanan (PLPP)	Skor
PLPP > 1,10	0,296
1,00 < PLPP ≤ 1,10	0,328
0,90 < PLPP ≤ 1,00	0,36
0,75 < PLPP ≤ 0,90	0,392
0,50 < PLPP ≤ 0,75	0,424
PLPP ≤ 0,50	0,46

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan izin pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 2 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan izin pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan adalah selama 3 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,424.

- f. Layanan pengelolaan air dan limbah.
1) Pelayanan rekomendasi sambungan air bersih.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian jasa}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian rekomendasi sambungan air bersih dihitung dengan jumlah waktu dalam setahun untuk menyelesaikan layanan tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap layanan yang dikerjakan selama setahun dibagi jumlah layanan rekomendasi sambungan air bersih yang dikerjakan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah waktu dalam satu tahun}}{\text{Jumlah jasa yang dikerjakan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan rekomendasi sambungan air bersih adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Rekomendasi Sambungan Air Bersih (AIR)	Skor
AIR > 1,10	0,162
1,00 < AIR ≤ 1,10	0,212
0,90 < AIR ≤ 1,00	0,272
0,75 < AIR ≤ 0,90	0,312
0,50 < AIR ≤ 0,75	0,372
AIR ≤ 0,50	0,432

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan rekomendasi sambungan air bersih untuk tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 2 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan rekomendasi sambungan air bersih adalah selama 3 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,372.

- 2) Pelayanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja).

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian jasa}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja) dihitung dengan jumlah waktu dalam setahun untuk menyelesaikan layanan tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap layanan yang dikerjakan selama setahun dibagi jumlah layanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja) yang dikerjakan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah waktu dalam satu tahun}}{\text{Jumlah jasa yang dikerjakan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja) adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Jasa Pengurusan <i>Septic Tank</i> (Sumur Tinja) (JPST)	Skor
JPST > 1,10	0,152
1,00 < JPST ≤ 1,10	0,192
0,90 < JPST ≤ 1,00	0,252
0,75 < JPST ≤ 0,90	0,292
0,50 < JPST ≤ 0,75	0,332
JPST ≤ 0,50	0,392

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja) untuk tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 2 hari per layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan jasa pengurusan *septic tank* (sumur tinja) adalah selama 3 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,332.

3) Pelayanan jasa pengolahan limbah domestik.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian jasa}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian jasa pengolahan limbah domestik dihitung dengan jumlah waktu dalam setahun untuk menyelesaikan layanan tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap layanan yang dikerjakan selama setahun dibagi jumlah layanan jasa pengolahan limbah domestik yang dikerjakan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah waktu dalam satu tahun}}{\text{Jumlah jasa yang dikerjakan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan jasa pengolahan limbah domestik adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Jasa Pengolahan Limbah Domestik (JPLD)	Skor
JPLD > 1,10	0,152
1,00 < JPLD ≤ 1,10	0,192
0,90 < JPLD ≤ 1,00	0,252
0,75 < JPLD ≤ 0,90	0,292
0,50 < JPLD ≤ 0,75	0,332
JPLD ≤ 0,50	0,392

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan jasa pengolahan limbah domestik untuk tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 2 hari per layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan jasa pengolahan limbah domestik adalah selama 3 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,332.

4) Pelayanan izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian jasa}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan jasa izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik dihitung dengan jumlah waktu dalam setahun untuk menyelesaikan layanan tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap layanan yang dikerjakan selama setahun dibagi jumlah layanan jasa izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik yang dikerjakan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

h

$$\frac{\text{Jumlah waktu dalam satu tahun}}{\text{Jumlah jasa yang dikerjakan pada satu tahun}}$$

Jumlah jasa yang dikerjakan pada satu tahun

Skor tingkat efisiensi layanan izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Izin Pengelola Pembuangan Limbah ke IPAL Domestik (IPAL)	Skor
IPAL > 1,10	0,152
1,00 < IPAL ≤ 1,10	0,192
0,90 < IPAL ≤ 1,00	0,252
0,75 < IPAL ≤ 0,90	0,292
0,50 < IPAL ≤ 0,75	0,332
IPAL ≤ 0,50	0,392

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik untuk tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 2 hari per layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik adalah selama 3 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,67 sehingga diperoleh skor sebesar 0,332.

- 5) Pelayanan sewa lahan KPLI-B3 Kabil.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian jasa}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Standar waktu yang ditetapkan

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan izin sewa lahan KPLI-B3 Kabil dihitung dengan jumlah waktu dalam setahun untuk menyelesaikan layanan tersebut, yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap layanan yang dikerjakan selama setahun dibagi jumlah layanan izin sewa lahan KPLI-B3 Kabil yang dikerjakan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah waktu dalam satu tahun}}{\text{Jumlah jasa yang dikerjakan pada satu tahun}}$$

Jumlah jasa yang dikerjakan pada satu tahun

Skor tingkat efisiensi layanan izin sewa lahan KPLI-B3 Kabil adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Sewa Lahan KPLI-B3 Kabil (KABIL)	Skor
KABIL > 1,10	0,152
1,00 < KABIL ≤ 1,10	0,192
0,90 < KABIL ≤ 1,00	0,252
0,75 < KABIL ≤ 0,90	0,292
0,50 < KABIL ≤ 0,75	0,332
KABIL ≤ 0,50	0,392

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil layanan izin sewa lahan KPLI-B3 Kabil untuk tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 6 hari per layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan izin sewa lahan KPLI-B3 Kabil adalah selama 7 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,86 sehingga diperoleh skor sebesar 0,292.

g. Layanan pelabuhan laut.

1) Pelayanan jasa kapal.

a) Kapal pada saat tiba di pelabuhan, (*Waiting Time Gross / WTG*).

$$WTG = WTN + PT + AT$$

Dimana:

WTN = *Waiting Time Net* yaitu jumlah waktu kapal menunggu utk disandarkan.

PT = *Postpone Time* yaitu jumlah waktu dikarenakan barang belum siap di pelabuhan (proses pengurusan administrasi).

AT = *Aproach Time* yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan (Pemanduan / Penundaan Kapal) dari lokasi labuh kapal ke dermaga.

$$AT = \frac{\sum (Jt - Jp)}{\sum K}$$

Jt = Jam tambat.

Jp = Jam pelayanan pandu.

K = Jumlah keseluruhan Kapal selama 1 tahun.

Skor tingkat efisiensi layanan kapal pada saat tiba di pelabuhan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan <i>Waiting Time Gross</i> (WTG)	Skor Total	Kapal		
		Non PK	PK	Pnp
WTG > 1,10	0,08	0,03	0,03	0,02
1,00 < WTG ≤ 1,10	0,16	0,06	0,06	0,04
0,90 < WTG ≤ 1,00	0,25	0,1	0,1	0,05
0,75 < WTG ≤ 0,90	0,32	0,13	0,13	0,06
0,50 < WTG ≤ 0,75	0,4	0,16	0,16	0,08
WTG ≤ 0,50	0,5	0,2	0,2	0,01

PK = Peti Kemas, Pnp = Penumpang

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukan total waktu rata-rata *Waiting Time Gross* (kapal kargo + kapal penumpang) adalah 60 jam pada tahun 20xx dan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap layanan kapal pada saat tiba di pelabuhan adalah selama 55 jam. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,09 sehingga diperoleh skor sebesar 0,16.

- b) Kapal pada saat berada di tambatan/sandar (*Berthing Time*/BT).
- BT = Waktu mulai tambat sampai waktu lepas tambat
- BT = BWT + NOT
- BWT = *Berth Working Time* yaitu jumlah waktu selama kegiatan bongkar muat selama kapal di dermaga
- NOT = *Non Operation Time* yaitu jumlah waktu yang direncanakan tidak bekerja, mis, karena keadaan cuaca, malam hari, dll
- BWT = IT + ET
- ET = *Effective Time* yaitu jumlah waktu yang benar-benar efektif digunakan dalam bekerja bongkar muat selama kapal di tambatan.
- IT = *Idle Time* yaitu jumlah waktu yang idle selama kegiatan bongkar muat selama kapal di tambatan, misalnya pergantian *shift*, alat rusak, dll.

Skor tingkat efisiensi layanan kapal pada saat berada di tambatan/sandar adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan <i>Berthing Time</i> (BT)	Skor Total	Kapal		
		Non PK	PK	Pnp
BT > 1,10	0,08	0,03	0,03	0,02
1,00 < BT ≤ 1,10	0,16	0,06	0,06	0,04
0,90 < BT ≤ 1,00	0,25	0,1	0,1	0,05
0,75 < BT ≤ 0,90	0,32	0,13	0,13	0,06
0,50 < BT ≤ 0,75	0,4	0,16	0,16	0,08
BT ≤ 0,50	0,5	0,2	0,2	0,1

PK = Peti Kemas, Pnp = Penumpang

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan total waktu rata-rata *Berthing Time* (kapal kargo + kapal penumpang) adalah 60 jam pada tahun 20xx dan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap layanan kapal pada saat tiba di pelabuhan adalah selama 55 jam. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,09 sehingga diperoleh skor sebesar 0,16.

- c) *Turn Round Time* (TRT) yaitu lama kapal di pelabuhan mulai semenjak kapal tiba di pintu masuk pelabuhan sampai keluar kembali dari pelabuhan, (TA s/d TD).
- TRT = WTG + BT
- WTG = *Waiting Time Gross*
- BT = *Berthing Time*

Skor tingkat efisiensi layanan mulai semenjak kapal tiba di pintu masuk pelabuhan sampai keluar kembali dari pelabuhan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan <i>Turn Round Time</i> (TRT)	Skor	Kapal Cargo	
		Non PK	PK
TRT > 1,10	0,06	0,03	0,03
1,00 < TRT ≤ 1,10	0,12	0,06	0,06
0,90 < TRT ≤ 1,00	0,2	0,1	0,1
0,75 < TRT ≤ 0,90	0,26	0,13	0,13
0,50 < TRT ≤ 0,75	0,32	0,16	0,16
TRT ≤ 0,50	0,4	0,2	0,2

PK = Peti Kemas

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan total *turn round time* (kapal peti kemas + non peti kemas) adalah 150 jam pada tahun 20xx dan waktu yang ditetapkan adalah selama 155 jam. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,97 sehingga diperoleh skor sebesar 0,2.

d) Rasio *Effective Time* dibanding *Berthing Time* (ET:BT).

Skor tingkat efisiensi rasio *Effective Time* dibanding *Berthing Time* adalah sebagai berikut:

Efisiensi Rasio <i>Efecctive Time</i> dibanding <i>Berthing Time</i> (ET:BT)	Skor	Kapal Cargo	
		Non PK	PK
ET:BT > 1,10	0,4	0,2	0,2
1,00 < ET:BT ≤ 1,10	0,32	0,16	0,16
0,90 < ET:BT ≤ 1,00	0,26	0,13	0,13
0,75 < ET:BT ≤ 0,90	0,2	0,1	0,1
0,50 < ET:BT ≤ 0,75	0,12	0,06	0,06
ET:BT ≤ 0,50	0,06	0,03	0,03

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan total rasio *Effective Time* dibanding *Berthing Time* (kapal peti kemas + non peti kemas) adalah 1,01 pada tahun 20xx. Dari data tersebut diperoleh skor sebesar 0,32.

2) Pelayanan jasa barang.

a) Non peti kemas.

Kinerja diukur dalam satuan ton/gang/jam yang merupakan jumlah barang dalam ton atau m³ yang dibongkar/dimuat dalam periode waktu 1 (satu) jam kerja oleh 1 (satu) gang.

- Ton Gang Jam (ton gang jam dan waktu yang tersedia di tambatan)

$$T/G/J = \frac{\Sigma \text{ barang yang dibongkar/muat per kapal}}{\Sigma \text{ gang per kapal x jam tersedia}}$$

Skor tingkat efisiensi kinerja layanan bongkar muat barang non peti kemas adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Bongkar Muat Non Peti Kemas (TGJ)	Skor
TGJ > 1,10	0,3
1,00 < TGJ ≤ 1,10	0,25
0,90 < TGJ ≤ 1,00	0,2
0,75 < TGJ ≤ 0,90	0,15
0,50 < TGJ ≤ 0,75	0,1
TGJ ≤ 0,50	0,05

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan bongkar muat barang non peti kemas adalah 50 ton/gang/jam pada tahun 20xx dan standar yang ditetapkan adalah selama 40 ton/gang/jam. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,25 sehingga diperoleh skor sebesar 0,3.

b) Peti kemas.

Kinerja diukur dalam satuan box/crane/Jam yang merupakan jumlah petikemas yang dibongkar/dimuat oleh 1 (satu) dalam periode waktu 1 (satu) jam.

- Box/Crane/Jam (waktu yang tersedia di tambatan)

$$B/C/J = \frac{\sum \text{peti kemas yang dibongkar/muat per kapal}}{\sum \text{crane per kapal} \times \text{jam tersedia}}$$

Tingkat efisiensi kinerja layanan bongkar muat barang peti kemas adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas (BCJ)	Skor
BCJ > 1,10	0,3
1,00 < BCJ ≤ 1,10	0,25
0,90 < BCJ ≤ 1,00	0,2
0,75 < BCJ ≤ 0,90	0,15
0,50 < BCJ ≤ 0,75	0,1
BCJ ≤ 0,50	0,05

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan bongkar muat barang non peti kemas adalah 50 box/crane/jam pada tahun 20xx dan standar yang ditetapkan adalah selama 40 box/crane/jam. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,25 sehingga diperoleh skor sebesar 0,3.

c) Receiving/delivery peti kemas.

Merupakan kecepatan pelayanan penyerahan/penerimaan di terminal peti kemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar yang dicatat di pintu masuk/keluar.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyerahan/penerimaan peti kemas}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyerahan/penerimaan peti kemas sama dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan penyerahan/penerimaan peti kemas yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap layanan yang dikerjakan selama setahun dibagi jumlah keluar masuk peti kemas selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah waktu dalam satu tahun}}{\text{Jumlah peti kemas yang keluar masuk pada satu tahun}}$$

Tingkat efisiensi layanan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan <i>Receiving/Delivery</i> Peti Kemas (R/D)	Skor
$R/D > 1,10$	0,03
$1,00 < R/D \leq 1,10$	0,06
$0,90 < R/D \leq 1,00$	0,1
$0,75 < R/D \leq 0,90$	0,13
$0,50 < R/D \leq 0,75$	0,16
$R/D \leq 0,50$	0,2

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan pelayanan penyerahan/penerimaan di terminal peti kemas menunjukkan rata-rata 33 menit pada tahun 20xx dan standar waktu yang ditetapkan adalah 24 menit. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,375 sehingga diperoleh skor sebesar 0,03.

3) Pelayanan sewa alat (Utilisasi Fasilitas).

a) Tingkat penggunaan dermaga (*Berth Occupancy Ratio/BOR*).

Rumus:

$$BOR = \frac{Vs \times St}{We \times n} \times 100\%$$

- Vs = jumlah kapal yang dilayani (unit/tahun)
- St = service time (jam/hari)
- n = jumlah tambatan, dan
- Waktu Efektif (We) = jumlah hari dalam satu tahun
Service time adalah waktu pelayanan kapal di tambatan, yang terdiri dari *operating time* (waktu efektif untuk bongkar muat barang) dan *not operating time*.

Tingkat efisiensi layanan penggunaan dermaga adalah sebagai berikut:

Efisiensi Tingkat Penggunaan Dermaga (%) (BOR)	Skor
BOR > 110	0,03
100 < BOR ≤ 110	0,06
90 < BOR ≤ 100	0,1
75 < BOR ≤ 90	0,13
50 < BOR ≤ 75	0,16
BOR ≤ 50	0,2

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan tingkat penggunaan dermaga memperoleh nilai BOR sebesar 75 % sehingga diperoleh skor sebesar 0,16.

b) Tingkat penggunaan gudang (*Shed Occupancy Ratio/SOR*).

Rumus:

$$SOR = \frac{M3Ton \text{ barang} \times \text{hari Dwelling Time}}{\text{Kapasitas Efektif penumpukan dalam ton/m}^3} \times 100\%$$

Dwelling time (DT) = Lama penumpukan maksimum di lapangan/gudang.

Dwelling time adalah lama waktu sejak barang keluar dari kapal sampai dengan barang keluar pelabuhan.

Tingkat efisiensi layanan penggunaan gudang adalah sebagai berikut:

Efisiensi Tingkat Penggunaan Gudang (SOR)	Skor
SOR > 1,10	0,03
1,00 < SOR ≤ 1,10	0,06
0,90 < SOR ≤ 1,00	0,1
0,75 < SOR ≤ 0,90	0,13
0,50 < SOR ≤ 0,75	0,16
SOR ≤ 0,50	0,2

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan tingkat penggunaan dermaga memperoleh nilai SOR sebesar 75% sehingga diperoleh skor sebesar 0,16.

c) Tingkat penggunaan lapangan penumpukan (*Yard Occupancy Ratio/YOR*).

Rumus:

$$YOR = \frac{\text{Jumlah peti kemas kapal} \times dt}{\text{Kapasitas lapangan} \times \text{tier} \times \text{hari}} \times 100\%$$

- Jumlah peti kemas kapal = Peti kemas muatan kapal.
- dt (*dwelling time*) = lama penumpukan maksimum di lapangan/gudang.
- kapasitas lapangan = kap.slot dikali banyaknya peti kemas tiap slot.
- tier = tinggi penumpukan peti kemas (3 box).
- hari = jumlah hari kalender bulan berjalan.

Skor tingkat efisiensi layanan penggunaan lapangan penumpukan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Tingkat Penggunaan Lapangan Penumpukan (YOR)	Skor
YOR > 1,10	0,03
1,00 < YOR ≤ 1,10	0,06
0,90 < YOR ≤ 1,00	0,1
0,75 < YOR ≤ 0,90	0,13
0,50 < YOR ≤ 0,75	0,16
YOR ≤ 0,50	0,2

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai hasil perhitungan efisiensi layanan tingkat penggunaan lapangan penumpukan (YOR) sebesar 0,55 sehingga diperoleh skor sebesar 0,16.

h. Layanan bandar udara.

1) Pelayanan jasa aeronautika Non ATS.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata pelayanan}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan dihitung dengan penjumlahan waktu dari setiap layanan yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah layanan yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah layanan yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Jasa Aeronautika non ATS (%) (non ATS)	Skor
non ATS ≥ 110	0,532
100 ≤ non ATS < 110	0,66
90 ≤ non ATS < 100	0,8
75 ≤ non ATS < 90	0,9
50 ≤ non ATS < 75	1,04
non ATS < 50	1,2

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan memperoleh nilai sebesar 95% sehingga diperoleh skor sebesar 0,8.

2) Pelayanan jasa non aeronautika.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata pelayanan}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan dihitung dengan penjumlahan waktu dari setiap layanan yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah layanan yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah layanan yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Jasa non Aeronautika (%) (non)	Skor
non \geq 110	0,46
100 \leq non $<$ 110	0,53
90 \leq non $<$ 100	0,58
75 \leq non $<$ 90	0,65
50 \leq non $<$ 75	0,72
non $<$ 50	0,8

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan memperoleh nilai sebesar 95% sehingga diperoleh skor sebesar 0,58.

i. Layanan rumah sakit.

1) *Bed Occupancy Rate* (BOR).

Bed Occupancy Rate dan selanjutnya disingkat "BOR" yaitu jumlah atau tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

Rumus:

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan}}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode}} \times 100\%$$

Penjelasan:

BOR dihitung berdasarkan persentase dari jumlah total hari perawatan dari keseluruhan pasien dalam setahun dibagi dengan jumlah tempat tidur yang ada, hasilnya dibagi dengan jumlah hari dalam tahun. Prosentase ini menunjukkan sampai berapa jauh pemakaian tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu.

Skor tingkat efisiensi layanan adalah sebagai berikut:

<i>Bed Occupancy Rate (%)</i> (BOR)	Skor
BOR > 90	0,15
85 < BOR ≤ 90	0,45
60 < BOR ≤ 85	0,6
55 < BOR ≤ 60	0,45
BOR ≤ 55	0,15

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan memperoleh nilai BOR sebesar 85% sehingga diperoleh skor sebesar 0,6.

2) *Average Length of Stay (ALOS)*.

ALOS merupakan rata-rata lama rawat seorang pasien dalam satu periode. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan.

$$ALOS = \frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$$

Penjelasan:

ALOS dihitung berdasarkan jumlah total hari perawatan dari keseluruhan pasien dalam setahun dibagi dengan jumlah pasien yang keluar dari rumah sakit baik dalam kondisi hidup maupun mati dalam periode satu tahun. Untuk mendapatkan lama dirawat pada setiap pasien dihitung dari kapan pasien pulang dan pasien tersebut masuk.

Skor tingkat efisiensi layanan adalah sebagai berikut:

<i>Average Length of Stay (hari)</i> (ALOS)	Skor
ALOS ≥ 12	0,15
9 ≤ ALOS < 12	0,4
6 ≤ ALOS < 9	0,6
3 ≤ ALOS < 6	0,4
ALOS < 3	0,15

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan memperoleh nilai ALOS yaitu 8 hari sehingga diperoleh skor sebesar 0,6.

3) *Turn Over Interval (TOI)*.

TOI merupakan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.

$$TOI = \frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{periode}) - \text{Hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$$

Penjelasan:

TOI dihitung berdasarkan jumlah total tempat tidur dalam satu periode dikurangi hari perawatan dalam setahun dibagi dengan jumlah pasien yang keluar dari rumah sakit baik dalam kondisi hidup maupun mati dalam periode satu tahun. Waktu rata-rata suatu tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh pasien lain.

Skor tingkat efisiensi layanan adalah sebagai berikut:

<i>Turn Over Interval</i> (hari) (TOI)	Skor
TOI > 7	0,04
5 < TOI ≤ 7	0,1
3 < TOI ≤ 5	0,2
0 < TOI ≤ 3	0,4

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan memperoleh nilai TOI yaitu 3 hari sehingga diperoleh skor sebesar 0,4.

4) *Bed Turn Over* (BTO).

BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata-rata dipakai lebih dari 40-50 kali.

$$BTO = \frac{\text{Jumlah pasien dirawat (hidup+mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$$

Penjelasan:

BTO dihitung berdasarkan jumlah total pasien baik dalam kondisi hidup maupun mati dalam satu periode dibagi dengan jumlah tempat tidur.

Skor tingkat efisiensi layanan adalah sebagai berikut:

<i>Bed Turn Over</i> (kali) (BTO)	Skor
BTO > 70	0,04
50 < BTO ≤ 70	0,1
40 < BTO ≤ 50	0,2
0 < BTO ≤ 40	0,4

Ilustrasi perhitungan:

BLU BP Batam mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan memperoleh nilai BTO yaitu 60 kali sehingga diperoleh skor sebesar 0,1.

j. Layanan teknologi informasi.

- 1) Pelayanan pengembangan sistem informasi terhadap bisnis proses BP Batam.

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian sistem software}}{\text{Target waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian sistem *software* merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap sistem yang dikembangkan. Target waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu yang ditetapkan untuk setiap tahapan pengembangan sistem informasi.

Skor tingkat efisiensi layanan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pengembangan Sistem Informasi (PSI)	Skor
PSI > 1,50	0,06
1,25 < PSI ≤ 1,50	0,13
1,00 < PSI ≤ 1,25	0,18
0,75 < PSI ≤ 1,00	0,25
0,50 < PSI ≤ 0,75	0,32
PSI ≤ 0,50	0,4

2) Pelayanan data center BP Batam.

$$\frac{\text{Kapasitas yang ditawarkan}}{\text{Kapasitas yang tersedia}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pengembangan Data Center (PDC)	Skor
PDC > 1,50	0,06
1,25 < PDC ≤ 1,50	0,13
1,00 < PDC ≤ 1,25	0,18
0,75 < PDC ≤ 1,00	0,25
0,50 < PDC ≤ 0,75	0,32
PDC ≤ 0,50	0,4

3. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

Subaspek mutu dan manfaat kepada masyarakat didasarkan atas indikator indeks kepuasan pelanggan/masyarakat terhadap kinerja pelayanan BP Batam.

Rumus:

$$\frac{\text{Hasil Penilaian IKM}}{\text{Skala Maksimal Nilai IKM}} \times \text{Skor maksimal penilaian}$$

Penjelasan:

Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan instansi pemerintah (KEP/25/M.PAN/2/2004).

Contoh perhitungan:

BP Batam mempunyai angka hasil survey (IKM) sebesar 80 dari skala maksimal 100. Dengan skor maksimal penilaian sebesar 10, maka skor mutu dan manfaat kepada masyarakat adalah:

$$\frac{80}{100} \times 10 = 8$$



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO

**TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA ASPEK PELAYANAN
BLU BIDANG LAYANAN LAINNYA
PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)**

A. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN

Perhitungan kinerja Aspek Pelayanan BLU bidang layanan lainnya pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mempunyai skor paling tinggi 70, yang terdiri atas:

1. Subaspek Pertumbuhan Produktivitas Layanan dengan skor paling tinggi 45;
2. Subaspek Efisiensi Layanan dengan skor paling tinggi 20; dan
3. Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi 5.

Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Skor
1.	Pertumbuhan Produktivitas Layanan	45
	a. Layanan pelabuhan laut.	35
	b. Layanan perizinan.	10
2.	Efisiensi Layanan	20
	a. Layanan pelabuhan laut.	15
	b. Layanan perizinan.	5
3.	Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat	5
	Indeks Kepuasan Masyarakat.	5
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2+3)		70

dm

B. PENILAIAN INDIKATOR PADA ASPEK PELAYANAN

1. Pertumbuhan Produktivitas Layanan

a. Layanan pelabuhan laut

1) Pelayanan jasa kapal

Pelayanan jasa kapal adalah layanan jasa labuh, jasa tambat, jasa tunda, jasa pandu dan jasa penyediaan air tawar ke kapal. Pertumbuhan pelayanan kapal dihitung dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan Pelayanan Jasa Kapal.

R0 = realisasi jumlah kapal yang dapat dilayani tahun sebelumnya.

(jumlah kapal kargo baik kontainer maupun non kontainer, kapal pesiar dan kapal lainnya).

R1 = realisasi jumlah kapal yang dapat dilayani tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan jasa kapal adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Kapal (%) (PJK)	Skor
$PJK \geq 20$	15
$10 \leq PJK < 20$	14
$0 \leq PJK < 10$	13
$-10 \leq PJK < 0$	12
$-40 \leq PJK < -10$	10
$PJK < -40$	8

Ilustrasi perhitungan:

BLU BPKS mempunyai data pelayanan jasa kapal tahun (20xx-1) sebanyak 256 kapal dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 275 kapal. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 7,42 % sehingga diperoleh skor sebesar 13.

2) Pelayanan jasa barang

Pelayanan jasa barang adalah layanan jasa bongkar muat barang, baik dari dan ke kapal, dermaga dan lapangan penumpukan. Pertumbuhan pelayanan jasa barang dihitung dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa bongkar muat barang.

R0 = realisasi jumlah barang yang dibongkar muat tahun sebelumnya.

(jumlah barang dalam tonage baik dalam kontainer maupun non kontainer).

R1 = realisasi jumlah barang yang dibongkar muat tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian pelayanan jasa bongkar muat barang adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang (%) (PBM)	Skor
PBM \geq 20	10
10 \leq PBM $<$ 20	9
0 \leq PBM $<$ 10	8
-10 \leq PBM $<$ 0	7
-40 \leq PBM $<$ -10	6
PBM $<$ -40	5

Ilustrasi perhitungan:

BLU BPKS mempunyai data pelayanan jasa bongkar muat barang tahun (20xx-1) sebanyak 2.560 ton dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 2.750 ton. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 7,42 % sehingga diperoleh skor sebesar 8.

3) Pelayanan sewa alat

Pertumbuhan pelayanan jasa sewa alat dihitung dengan rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan pelayanan jasa sewa alat.

R0 = realisasi jumlah pelayanan jasa sewa alat tahun sebelumnya.

R1 = realisasi jumlah pelayanan jasa sewa alat yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian layanan jasa sewa alat adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelayanan Jasa Sewa Alat (%) (SEWA)	Skor
SEWA \geq 20	10
10 \leq SEWA $<$ 20	9
0 \leq SEWA $<$ 10	8
-10 \leq SEWA $<$ 0	7
-40 \leq SEWA $<$ -10	6
SEWA $<$ -40	5

Ilustrasi perhitungan:

BLU BPKS mempunyai data peralatan yang disewakan tahun (20xx-1) sebanyak 12 alat dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 13 alat. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 8,33 % sehingga diperoleh skor sebesar 8.

b. Layanan perizinan

Pertumbuhan pelayanan izin impor

Rumus:

$$Pt = \frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Penjelasan:

Pt = pertumbuhan izin impor

R0 = realisasi izin impor yang diterbitkan tahun sebelumnya.

R1 = realisasi izin impor yang diterbitkan tahun yang dihitung.

Skor pertumbuhan pemberian persetujuan izin impor adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Izin Impor (%) (IM)	Skor
IM \geq 20	10
10 \leq IM $<$ 20	9
0 \leq IM $<$ 10	8
-10 \leq IM $<$ 0	7
-40 \leq IM $<$ -10	6
IM $<$ -40	5

Ilustrasi perhitungan:

BLU BPKS mempunyai data layanan persetujuan izin impor tahun (20xx-1) sebanyak 66 dokumen dan pada tahun 20xx terjadi sebanyak 80 dokumen. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh nilai pertumbuhan sebesar 21,21 % sehingga diperoleh skor sebesar 10. (catatan: satuan ukur agar dibuat dengan jelas sesuai dengan jenis layanan)

2. Efisiensi Layanan

a. Layanan pelabuhan laut

1) Pelayanan jasa kapal

Kapal pada saat tiba di pelabuhan, (*Waiting Time Gross / WTG*).

$$WTG = WTN + PT + AT$$

Dimana:

WTN = *Waiting Time Net* yaitu jumlah waktu kapal menunggu utk disandarkan.

PT = *Postpone Time* yaitu jumlah waktu dikarenakan barang belum siap di pelabuhan (proses pengurusan administrasi).

AT = *Aproach Time* yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan (Pemanduan / Penundaan Kapal) dari lokasi labuh kapal ke dermaga.

$$AT = \frac{\sum (Jt - Jp)}{\sum K}$$

Jt = Jam tambat.

Jp = Jam pelayanan pandu.

K = Jumlah keseluruhan Kapal selama 1 tahun.

Skor tingkat efisiensi layanan kapal pada saat tiba di pelabuhan adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan <i>Waiting Time Gross</i> (WTG)	Skor
WTG $>$ 1,10	1
1,00 $<$ WTG \leq 1,10	2
0,90 $<$ WTG \leq 1,00	3
0,75 $<$ WTG \leq 0,90	3,5
0,50 $<$ WTG \leq 0,75	4
WTG \leq 0,50	5

Ilustrasi perhitungan:

BLU BPKS mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan total waktu rata-rata *Waiting Time Gross* (kapal kargo + kapal penumpang) adalah 60 jam pada tahun 20xx dan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap layanan kapal pada saat tiba di pelabuhan adalah selama 55 jam. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,09 sehingga diperoleh skor sebesar 2.

2) Pelayanan jasa barang

a) Non peti kemas

Kinerja diukur dalam satuan ton/gang/jam yang merupakan jumlah barang dalam ton atau m³ yang dibongkar/dimuat dalam periode waktu 1 (satu) jam kerja oleh 1 (satu) gang.

- Ton Gang Jam (ton gang jam dan waktu yang tersedia di tambatan)

$$T/G/J = \frac{\Sigma \text{ barang yang dibongkar/muat per kapal}}{\Sigma \text{ gang per kapal x jam tersedia}}$$

Skor tingkat efisiensi kinerja layanan bongkar muat barang non peti kemas adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Bongkar Muat Non Peti Kemas (TGJ)	Skor
TGJ > 1,10	2,5
1,00 < TGJ ≤ 1,10	2,25
0,90 < TGJ ≤ 1,00	2
0,75 < TGJ ≤ 0,90	1,75
0,50 < TGJ ≤ 0,75	1,5
TGJ ≤ 0,50	1,25

Ilustrasi perhitungan:

BLU BPKS mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan bongkar muat barang non peti kemas adalah 50 ton/gang/jam pada tahun 20xx dan standar yang ditetapkan adalah selama 40 ton/gang/jam. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,25 sehingga diperoleh skor sebesar 2.5.

b) Peti kemas

Kinerja diukur dalam satuan box/crane/Jam yang merupakan jumlah petikemas yang dibongkar/dimuat oleh 1 (satu) dalam periode waktu 1 (satu) jam.

- Box/Crane/Jam (waktu yang tersedia di tambatan)

$$B/C/J = \frac{\Sigma \text{ peti kemas yang dibongkar/muat per kapal}}{\Sigma \text{ crane per kapal x jam tersedia}}$$

Tingkat efisiensi kinerja layanan bongkar muat barang peti kemas adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas (BCJ)	Skor
BCJ > 1,10	2,5
1,00 < BCJ ≤ 1,10	2,25
0,90 < BCJ ≤ 1,00	2
0,75 < BCJ ≤ 0,90	1,75
0,50 < BCJ ≤ 0,75	1,5
BCJ ≤ 0,50	1,25

Ilustrasi perhitungan:

BLU BPKS mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan bongkar muat barang non peti kemas adalah 50 box/crane/jam pada tahun 20xx dan standar yang ditetapkan adalah selama 40 box/crane/jam. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,25 sehingga diperoleh skor sebesar 2.5.

3) Pelayanan sewa alat

Tingkat penggunaan dermaga (*Berth Occupancy Ratio/BOR*).

Rumus:

$$BOR = \frac{Vs \times St}{We \times n} \times 100\%$$

- Vs = jumlah kapal yang dilayani (unit/tahun)
- St = service time (jam/hari)
- n = jumlah tambatan, dan
- Waktu Efektif (We) = jumlah hari dalam satu tahun

Service time adalah waktu pelayanan kapal di tambatan, yang terdiri dari *operating time* (waktu efektif untuk bongkar muat barang) dan *not operating time*.

Tingkat efisiensi layanan penggunaan dermaga adalah sebagai berikut:

Efisiensi Tingkat Penggunaan Dermaga (%) (BOR)	Skor
BOR > 110	5
100 < BOR ≤ 110	4
90 < BOR ≤ 100	3.5
75 < BOR ≤ 90	3
50 < BOR ≤ 75	2
BOR ≤ 50	1

Ilustrasi perhitungan:

BLU BPKS mempunyai data hasil perhitungan menunjukkan layanan tingkat penggunaan dermaga memperoleh nilai BOR sebesar 75 % sehingga diperoleh skor sebesar 2.

b. Layanan perizinan

Efisiensi pelayanan izin impor.

Rumus efisiensi:

$$\frac{\text{Waktu rata-rata penyelesaian izin}}{\text{Standar waktu yang ditetapkan}}$$

Penjelasan:

Waktu rata-rata penyelesaian layanan penerbitan izin impor dihitung dengan jumlah hari dalam setahun untuk menyelesaikan izin yang diperoleh dari penjumlahan waktu dari setiap izin yang dikeluarkan selama setahun dibagi jumlah dokumen izin impor yang dikeluarkan selama satu tahun, yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hari dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan pada satu tahun}}$$

Skor tingkat efisiensi layanan penerbitan izin impor adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pelayanan Izin Impor (IM)	Skor
IM > 1,10	5
1,00 < IM ≤ 1,10	4
0,90 < IM ≤ 1,00	3.5
0,75 < IM ≤ 0,90	3
0,50 < IM ≤ 0,75	2
IM ≤ 0,50	1

Ilustrasi perhitungan:

BLU BPKS mempunyai data hasil layanan penerbitan izin impor tahun 20xx menunjukkan waktu rata-rata penyelesaian selama 8 hari per dokumen layanan dan waktu yang ditetapkan (standar) untuk menyelesaikan setiap layanan penerbitan izin impor adalah selama 10 hari. Dari data tersebut dengan rumus di atas diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,80 sehingga diperoleh skor sebesar 3.

3. Mutu dan Manfaat pada Masyarakat

Subaspek mutu dan manfaat kepada masyarakat didasarkan atas indikator indeks kepuasan pelanggan/masyarakat terhadap kinerja pelayanan BPKS.

Rumus:

$$\frac{\text{Hasil Penilaian IKM}}{\text{Skala Maksimal Nilai IKM}} \times \text{Skor Maksimal Penilaian}$$

Penjelasan:

Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan instansi pemerintah.

Contoh perhitungan:

BPKS mempunyai angka hasil survey (IKM) sebesar 80 dari skala maksimal 100. Dengan skor maksimal penilaian sebesar 10, maka skor mutu dan manfaat kepada masyarakat adalah:

$$\frac{80}{100} \times 5 = 4$$



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

DIREKTUR
JENDERAL

Marwanto

MARWANTO HARJOWIRYONO

dk